



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANANG SUJOKO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 670281

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.040.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 569 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 2.005.000.000
2. Tanah Seluas 1890 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HADIAH Rp. 135.000.000
3. Tanah Seluas 2110 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 2187 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 1735 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 384.750.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. LAINNYA, SPECIALIZED ROAD TRAIL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 750.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. MOTOR, YAMAHA R15 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.611.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	714.980.869
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.163.341.869
III. HUTANG	Rp.	5.476.673
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.157.865.196

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.